

**POLITIK HUKUM SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN MASYARAKAT:
Analisis Humaniora Terhadap Sistem Hukum di Indonesia**

Oleh: Sofhuan Yusfiansyah¹; Fajar²

¹Doktor Ilmu Hukum, Universitas Borobudur, Indonesia

¹Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia

Email. sofhuanyusfiansyah@gmail.com; fajarphilosophy@gmail.com

Article history:

Submitted: 30-05-2025

Revised: 07-06-2025

Accepted: 14-06-2025

Abstract

This article aims to explore the legal politics of societal protection tools, specifically analyzing the Indonesian legal system from a humanities perspective. The focus lies on the role of legal instruments in safeguarding citizens' rights and their implementation within the framework of Indonesian law. By examining historical, cultural, and social contexts, this analysis investigates how the legal system in Indonesia influences public protection policies, especially in addressing challenges such as human rights violations, social justice, and the balance between state authority and individual freedoms. Utilizing a humanistic approach, this paper highlights the critical need for reforms that can create a more inclusive, fair, and effective legal structure for society. Additionally, the study stresses the importance of legal education and advocacy in raising public awareness of legal protections and ensuring that laws remain aligned with the evolving needs and values of Indonesian society. This research is significant in shaping future legal reforms for better societal protection.

Keywords: Human Rights; Legal Protection; Legal Reform.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi politik hukum alat perlindungan masyarakat, dengan menganalisis sistem hukum Indonesia dari perspektif humaniora. Fokus utama adalah pada peran instrumen hukum dalam melindungi hak-hak warga negara dan penerapannya dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan memeriksa konteks historis, budaya, dan sosial, analisis ini menyelidiki bagaimana sistem hukum di Indonesia mempengaruhi kebijakan perlindungan publik, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pelanggaran hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan individu. Menggunakan pendekatan humanistik, makalah ini menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang dapat menciptakan struktur hukum yang lebih inklusif, adil, dan efektif untuk masyarakat. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan hukum dan advokasi dalam meningkatkan kesadaran publik tentang perlindungan hukum dan memastikan bahwa hukum tetap sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Penelitian ini penting dalam membentuk reformasi hukum di masa depan untuk perlindungan masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum; Reformasi Hukum.

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum adalah salah satu pilar utama dalam sebuah negara demokrasi yang berfungsi untuk menjaga hak-hak individu serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh keadilan.¹ Dalam konteks Indonesia, negara yang memiliki dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak asasi manusia (HAM) harus dilindungi dan ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan terhadap HAM adalah bagian integral dari sistem hukum nasional yang harus mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, meskipun Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan hukum terkait dengan HAM, banyak tantangan dalam implementasinya, baik di tingkat hukum maupun di masyarakat.

Sistem hukum Indonesia yang terbentuk berdasarkan warisan hukum kolonial dan kearifan lokal telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan.² Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hukum adalah bagaimana menyeimbangkan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Pada era pasca-Reformasi, Indonesia mengadopsi berbagai reformasi hukum yang mengarah pada penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, meskipun berbagai peraturan dan lembaga negara telah dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut, pelanggaran HAM dan ketidakadilan hukum masih terjadi.

Penting untuk dicatat bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia membutuhkan evaluasi dan pembaruan untuk menghadapi tantangan-tantangan sosial dan politik yang muncul. Pembaharuan hukum yang bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman sangat diperlukan agar sistem perlindungan hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang semakin kompleks. Tanpa adanya reformasi hukum yang signifikan, perlindungan hak asasi manusia akan sulit tercapai, dan dampaknya akan menghambat terciptanya keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

¹ Shafiyah Adinda and Gultom Elisatris, "Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. November (2024): 466–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484>.

² Irwan Simbolon Citra, Rizky Ariesvy Sitanggung Baginda, and Rosmalinda, "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 5 (2024): 423–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2700>.

Dalam upaya mewujudkan reformasi hukum, keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga internasional sangatlah penting. Keberhasilan dalam melaksanakan reformasi hukum tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta memastikan penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran yang sangat vital dalam mendampingi korban pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan advokasi bagi tercapainya kebijakan perlindungan yang efektif.

Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah reformasi dalam sektor peradilan. Proses peradilan yang tidak transparan, korupsi, dan sistem yang tidak berfungsi dengan baik sering kali menghambat upaya pencapaian keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan sistem peradilan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui reformasi di sektor ini, harapannya adalah terciptanya lembaga peradilan yang lebih bersih, profesional, dan mampu memberikan keputusan yang independen dan objektif.

Di sisi lain, implementasi perlindungan hak asasi manusia harus dapat dirasakan di seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini membutuhkan kebijakan hukum yang proaktif, yang mengutamakan kebutuhan dasar setiap individu, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan hukum harus merumuskan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak fundamental setiap warga negara.

Isu hak asasi manusia di Indonesia juga tidak lepas dari masalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan sosial, diskriminasi rasial, kesulitan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah yang terus-menerus dihadapi oleh banyak kelompok di masyarakat.³ Dalam hal ini, reformasi hukum yang inklusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum bukan hanya menguntungkan

³ Sarah Apriliandra and Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.

kelompok-kelompok tertentu, tetapi dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa reformasi hukum tidak hanya terbatas pada aspek formal dari peraturan-peraturan hukum, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan akses terhadap bantuan hukum harus dijadikan bagian dari sistem pendidikan nasional agar setiap individu dapat mengetahui hak-hak dasar yang dimiliki dan dapat melindunginya apabila terjadi pelanggaran.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggar hak asasi manusia juga harus dilakukan dengan konsisten dan tanpa pandang bulu. Hukum yang berlaku harus mampu menjamin bahwa setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh negara, korporasi, ataupun individu, akan mendapat sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, perlu diperkuat juga sistem pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara, agar mereka tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Pentingnya memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hak asasi manusia juga tidak bisa diabaikan. Negara-negara di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan konvensi internasional yang telah disepakati, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Indonesia, sebagai anggota masyarakat internasional, juga memiliki peran penting dalam menjaga komitmennya terhadap perlindungan HAM, baik di dalam negeri maupun dalam kerjasama dengan negara-negara lain.⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi, tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia juga semakin kompleks. Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, keamanan digital, dan kebebasan berbicara dalam dunia maya memerlukan perubahan dalam sistem hukum agar sesuai dengan kemajuan teknologi. Perlindungan hak asasi manusia harus meliputi dimensi-dimensi baru seperti privasi di dunia digital, yang kini menjadi perhatian penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Reformasi hukum yang dibutuhkan seharusnya tidak hanya mengubah

⁴ Mortheza Hairy Yazdi, Danta Gavin, and Simamora Fredly David, "Peran Hukum Internasional Dalam Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

struktur kelembagaan, tetapi juga memperkuat kapasitas sistem hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan lebih efektif. Ini meliputi pelatihan bagi aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga negara yang terkait, serta pemantauan yang lebih transparan terhadap pelaksanaan hukum. Hal ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efisien, dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan hukum yang efektif juga akan memberikan rasa aman bagi warga negara, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan negara.⁵ Rakyat yang merasa hak-haknya dilindungi cenderung memiliki rasa percaya diri dan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, yang kemudian mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, sistem hukum yang kokoh dan responsif terhadap perkembangan masyarakat adalah salah satu faktor penentu bagi kemajuan negara.

Kesadaran akan pentingnya reformasi hukum bagi perlindungan hak asasi manusia tidak hanya berasal dari kalangan elite atau pemangku kebijakan, tetapi juga dari kalangan masyarakat umum. Banyak individu dan kelompok yang terpinggirkan belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, baik dalam konteks ekonomi, sosial, atau politik. Oleh karena itu, disarankan agar ada upaya untuk lebih mendekatkan hukum kepada masyarakat, melalui penyuluhan hukum, kampanye kesadaran hak asasi manusia, serta pelibatan aktif dalam diskursus hukum di tingkat nasional.

Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan reformasi hukum adalah masalah politik dan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan bahwa perlindungan hak asasi manusia akan dikorbankan demi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian dari semua pihak untuk melakukan reformasi yang memang diletakkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain itu, reformasi hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia juga harus dapat menanggapi berbagai permasalahan baru yang muncul

⁵ Andanu Raditya, "Peran Pemerintah Indonesia Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Antara Indonesia - Singapura," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 567–78, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1992>.

akibat perubahan sosial dan politik yang dinamis. Seperti halnya peraturan yang melindungi hak-hak pekerja di era digital atau perlindungan bagi korban kejahatan transnasional seperti perdagangan orang. Hukum harus cukup fleksibel untuk mengatur dan menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Secara keseluruhan, reformasi hukum di Indonesia harus diarahkan pada peningkatan efektivitas perlindungan hak asasi manusia serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Ini adalah upaya yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga negara, masyarakat sipil, dan masyarakat internasional. Ketika semua elemen ini bekerja bersama untuk memperkuat sistem hukum, maka negara Indonesia akan semakin mampu menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma yang ada dalam sistem hukum Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan-keputusan hakim yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak asasi manusia.⁶ Metode ini memungkinkan penulis untuk menilai dan mengkritisi sejauh mana hukum Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu di masyarakat.

Dalam penelitian normatif hukum, penelitian ini berusaha untuk menggali ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada berbagai peraturan yang dianggap penting, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk peraturan yang terkait dengan kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan sosial.

Salah satu tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menilai relevansi dan efektivitas peraturan yang ada, serta mengidentifikasi kekurangan dan celah dalam sistem perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini akan menganalisis apakah peraturan yang berlaku telah mencakup aspek yang sesuai dengan standar internasional tentang hak asasi manusia, terutama yang dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konvensi internasional lainnya.

⁶ Nafisah Kuriain and Enny Winarni, *Metodologi Penelitian* (Saba Jaya Publisher, 2022).

Metode normatif hukum juga memungkinkan untuk memahami perkembangan hukum yang ada di Indonesia terkait hak asasi manusia, mulai dari masa kolonial hingga era pasca-Reformasi. Penelitian ini berupaya untuk menggali akar hukum dan filosofi yang membentuk perlindungan terhadap hak-hak individu, serta mengevaluasi sejauh mana hukum Indonesia saat ini telah mencerminkan prinsip-prinsip yang menjamin penghormatan terhadap martabat manusia.

Analisis ini melibatkan penelaahan terhadap doktrin hukum yang ada, yang sering kali dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilihat sejauh mana pandangan dan pemikiran hukum berkontribusi terhadap pembentukan sistem perlindungan yang adil dan mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia.⁷

Sebagai bagian dari pendekatan ini, penelitian ini juga akan mencakup tinjauan terhadap pengadilan dan keputusan hakim terkait hak asasi manusia. Penilaian terhadap praktik peradilan sangat penting, mengingat fungsi pengadilan sebagai ujung tombak dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Keputusan hakim dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia akan dianalisis untuk mengidentifikasi sejauh mana proses peradilan dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Dengan pendekatan normatif hukum, penelitian ini juga akan membahas sejauh mana implementasi perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan sesuai dengan harapan. Penelitian ini akan mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam merumuskan undang-undang atau peraturan pelaksana, serta sejauh mana regulasi-regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan hukum yang dihadapi dalam upaya penegakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, seperti masalah kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, serta ketidakmampuan lembaga-lembaga negara dalam mengawasi pelaksanaannya. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hambatan-hambatan yang harus diatasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak individu.

Secara keseluruhan, dengan menggunakan metode penelitian normatif hukum, penelitian ini bertujuan untuk menyumbang pemahaman yang lebih dalam tentang hukum

⁷ Fatah Nasution Abdul, *Metode Penelitian, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Harfa Groups, 2019).

Indonesia dan upaya untuk memperbaiki sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembaruan atau reformasi hukum demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia.

C. Pembahasan

1. Peran Politik Hukum dalam Mewujudkan Perlindungan Masyarakat

Politik hukum merupakan suatu konsep yang melibatkan keputusan-keputusan politik yang bertujuan untuk merumuskan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan hukum.⁸ Dalam konteks Indonesia, politik hukum sangat mempengaruhi cara negara merancang dan mengatur perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Melalui proses politik, negara memutuskan aturan-aturan hukum yang menjadi alat untuk melindungi masyarakat, termasuk hak asasi manusia, keselamatan, dan keadilan sosial. Proses ini memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang dianut oleh negara.

Politik hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi politik, dinamika sosial, dan kepentingan ekonomi. Keputusan-keputusan politik yang diambil dalam pengembangan undang-undang dan kebijakan hukum sering kali mencerminkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Proses politik ini menjadi sangat penting karena dengan politik hukum, negara dapat mengarahkan kebijakan hukum yang akan digunakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin timbul, seperti pelanggaran hak asasi manusia, tindak kekerasan, dan ketidaksetaraan.

Salah satu fungsi utama politik hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, baik dari tindak penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, perusahaan, atau individu. Dengan politik hukum yang kuat, kebijakan hukum yang dihasilkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak dasar mereka tidak akan dilanggar atau diinjak-injak. Ini mencakup hak atas perlindungan dari diskriminasi, akses ke pendidikan, kesehatan, serta hak atas lingkungan yang aman dan sehat.

Dalam prakteknya, perlindungan masyarakat melalui politik hukum

⁸ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum* (Penerbit Airlangga, 2017).

melibatkan upaya membentuk peraturan-peraturan yang melindungi hak individu dan kelompok, serta menanggulangi potensi konflik sosial yang bisa muncul. Negara diharapkan untuk membentuk regulasi yang mengutamakan kepentingan bersama, yang dapat melindungi pihak-pihak yang lebih rentan dalam masyarakat. Perlindungan hukum harus bisa menjawab kebutuhan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat, seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, atau kekerasan berbasis gender dan etnis.

Proses legislasi adalah arena di mana politik hukum bertemu dengan praktik perlindungan masyarakat. Dalam membentuk peraturan yang adil dan bermartabat, politik hukum harus memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini membutuhkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, bukan hanya dari kalangan pemerintah atau legislatif, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan global, politik hukum juga harus mampu merespon isu-isu internasional yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, seperti perdagangan manusia, terorisme, dan perubahan iklim. Politik hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang sering kali memperkenalkan tantangan baru dalam perlindungan hak masyarakat. Negara Indonesia, sebagai anggota dari komunitas internasional, perlu menunjukkan komitmennya terhadap penerapan konvensi dan kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia dan perlindungan sosial.⁹

Politik hukum berperan penting dalam pembentukan lembaga-lembaga negara yang dapat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Lembaga-lembaga ini, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga peradilan, harus didorong untuk bertindak secara independen dan objektif. Agar dapat melindungi masyarakat secara maksimal, lembaga-lembaga ini memerlukan dukungan politik yang kuat agar mereka dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya intervensi yang mengurangi otoritas atau

⁹ Agus Wibowo, *Hukum Di Era Globalisasi Digital*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023).

kemandirian mereka.

Namun, penguatan politik hukum dalam perlindungan masyarakat juga dihadapkan pada tantangan internal dalam sistem hukum Indonesia. Terdapat tantangan struktural, seperti ketidakjelasan koordinasi antar lembaga negara, serta tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Politik hukum yang lemah sering kali berdampak pada ketidakefektifan dalam menegakkan hak-hak masyarakat, yang kemudian menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Selain itu, politik hukum harus dapat menangani pelaksanaan hukum di tingkat lokal yang sering kali berbeda dengan kebijakan yang ada di pusat. Pemberian otonomi daerah memerlukan perhatian khusus dalam hal bagaimana kebijakan hukum nasional dapat diterjemahkan dengan adil di tingkat daerah, memperhatikan perbedaan kultur, tradisi, dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, perlu ada sinergi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah agar perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif.

Pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam politik hukum juga tidak bisa diabaikan. Agar perlindungan masyarakat tercapai secara maksimal, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Pemahaman yang lebih dalam tentang hak-hak mereka serta keterlibatan aktif dalam diskursus hukum dapat memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk sekelompok elit, tetapi dapat menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini juga akan memperkuat sistem hukum yang lebih inklusif dan partisipatif.

Pelaksanaan politik hukum yang lebih baik juga bergantung pada komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Kehadiran lembaga pengawasan yang mandiri dan efektif sangat penting dalam mengawasi implementasi kebijakan hukum, memastikan bahwa hak masyarakat benar-benar terlindungi, dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlunya pengawasan yang transparan dan akuntabel menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum yang adil dan berpihak pada masyarakat.

Dalam perkembangan zaman, dengan dinamika sosial dan budaya yang cepat berubah, politik hukum juga harus mampu merespon isu-isu baru yang timbul. Misalnya, peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak digital dan

perlindungan data pribadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang dibuat harus mampu menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dan perlindungan hak-hak masyarakat di era modern.

Secara keseluruhan, peran politik hukum dalam mewujudkan perlindungan masyarakat sangat penting, tidak hanya dalam menghasilkan peraturan yang adil, tetapi juga dalam memastikan pelaksanaan hukum tersebut di lapangan. Politik hukum yang transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat mewujudkan sistem hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan yang merata bagi warga negara.

2. Humaniora dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia

Humaniora, sebagai kajian ilmu yang mendalami aspek kemanusiaan dalam berbagai dimensi kehidupan, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sistem hukum di Indonesia.¹⁰ Kajian ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, nilai-nilai tersebut seharusnya tercermin dalam sistem hukum yang mampu menegakkan keadilan sosial, dengan fokus pada penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat.

Sistem hukum Indonesia dibangun berdasarkan prinsip keadilan, yang diharapkan dapat melindungi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Keadilan sosial adalah salah satu pilar utama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan atau terpinggirkan.

Penerapan prinsip humaniora dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada norma dan prosedur yang berlaku, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan martabat individu. Dalam banyak hal, pengaruh teori-teori hukum

¹⁰ Sigit Purnama et al., *Islam Dan Ilmu Sosial Humaniora*, Yogyakarta, 2021.

yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting untuk mengarahkan sistem hukum agar lebih peka terhadap perubahan sosial dan tuntutan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Dalam sejarahnya, hukum Indonesia memang bertransformasi seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Setelah periode kolonial, sistem hukum Indonesia memasuki fase demokratisasi yang semakin menekankan pentingnya hak-hak asasi manusia dan kesetaraan.¹¹ Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memadukan idealisme keadilan sosial dengan kenyataan bahwa ketimpangan ekonomi, sosial, dan budaya masih cukup mencolok di berbagai lapisan masyarakat.

Keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia mengandung makna bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Namun, tidak jarang dalam pelaksanaannya, banyak kelompok marginal atau rentan yang justru terabaikan atau menjadi korban ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap implementasi kebijakan hukum yang benar-benar menyentuh kebutuhan kelompok-kelompok tersebut, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Kajian humaniora yang berhubungan dengan sistem hukum ini menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dan kemampuan hukum itu sendiri dalam merespons kebutuhan akan perubahan sosial. Oleh karena itu, keadilan sosial bukan hanya menjadi tujuan teoritis, tetapi juga menjadi keniscayaan yang harus dijamin dan diwujudkan dalam praktik hukum. Untuk itu, kajian terhadap konsep keadilan dalam hukum perlu dilihat dalam konteks sosial yang dinamis, baik dari sudut pandang hukum internasional maupun hukum nasional.

Pentingnya pendekatan humaniora dalam menilai implementasi hukum juga terlihat dalam perlindungan terhadap hak-hak individu yang dihadapi oleh sistem hukum. Ini termasuk hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan hak untuk mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hukum Indonesia, yang seharusnya mengutamakan keadilan sosial, harus mampu menanggulangi segala bentuk pelanggaran terhadap

¹¹ Nurdin Nurliah and Ummy Athahira Astika, *Ham, Gender Dan Demokrasi*, vol. 7 (Penerbit Sketsa Media, 2020).

hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Prinsip humaniora memberikan ruang bagi individu untuk mengakses keadilan tanpa harus terhambat oleh status sosial, ekonomi, maupun etnis mereka. Sebagai contoh, hukum harus menjamin hak setiap orang, termasuk mereka yang terpinggirkan, untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Dalam hal ini, politik hukum harus bekerja sama dengan kebijakan sosial untuk membangun sistem yang mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Sistem peradilan Indonesia, meskipun diatur dalam kerangka hukum positif, masih menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara kelompok-kelompok tertentu. Hal ini sering kali memicu ketidakpuasan masyarakat, karena keadilan sosial menjadi semakin sulit dijangkau, terutama bagi mereka yang berada di luar kelompok yang dominan. Oleh karena itu, perubahan dalam cara berpikir hukum yang lebih humanistik perlu diterapkan agar keadilan sosial benar-benar dapat diwujudkan.

Penggunaan pendekatan humaniora juga terkait dengan pembentukan norma-norma hukum yang mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip moral yang mengutamakan penghormatan terhadap individu. Dalam sistem hukum Indonesia, untuk menjaga agar keadilan sosial dapat tercapai, pengadilan dan lembaga-lembaga hukum lainnya harus beroperasi dengan dasar penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap ketidakadilan yang ada dalam kebijakan atau putusan yang dapat memengaruhi kelompok minoritas atau kelompok rentan.

Selain itu, pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai humaniora menjadi semakin penting. Pendidikan ini harus mengajarkan kepada masyarakat dan praktisi hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik hukum mereka. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan tentang hak asasi manusia, serta pengembangan kesadaran akan perlunya menciptakan ruang hukum yang adil dan penuh empati bagi setiap individu dalam masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan yang ada. Hukum harus bisa mengatur dan mengintervensi agar kesenjangan yang terjadi

tidak menambah ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program-program hukum yang proaktif dalam mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi yang sering menghalangi tercapainya keadilan sosial.

Dari sisi peran negara, sangat penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip humaniora dan keadilan sosial dalam seluruh aspek pembangunan hukum, termasuk reformasi hukum yang mendalam.¹² Pemerintah, bersama dengan masyarakat, harus membangun sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, dialog antara berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, harus terus dilakukan untuk mencapai solusi yang tepat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga hukum yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip humaniora adalah kunci untuk membangun sistem hukum Indonesia yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan. Keadilan sosial akan lebih mudah tercapai ketika nilai-nilai kemanusiaan dijadikan dasar dalam setiap kebijakan dan praktik hukum. Sebagai hasil akhirnya, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta pembangunan hukum yang adil dan manusiawi akan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil dan beradab.

3. Tantangan dan Peluang Reformasi Hukum untuk Perlindungan Masyarakat di Indonesia

Reformasi hukum di Indonesia merupakan proses yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perlindungan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari reformasi hukum yang sedang dan akan terus dilakukan. Namun, meskipun reformasi hukum menjadi agenda penting di Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan tersebut secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar dalam reformasi hukum adalah adanya tumpang tindih atau ketidakselarasan antara undang-undang yang ada. Proses legislasi yang berjalan seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga

¹² Milthree Saragih Geofani, Sathya Sanathana Ishwara Ade, and Kusuma Putra Rengga, "Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia Melalui Pendekatan Konstitusional," *Jurnal Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024): 202–17.

menghasilkan peraturan yang saling bertentangan atau kurang jelas penerapannya. Hal ini menyebabkan kebingungan di tingkat penegakan hukum dan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Misalnya, terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapan undang-undang yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, adanya praktik korupsi di beberapa sektor pemerintahan, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif, menjadi tantangan besar lainnya. Korupsi dapat menghambat terlaksananya reformasi hukum secara maksimal karena keputusan-keputusan yang diambil lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat banyak. Korupsi dalam praktik hukum sering kali merugikan masyarakat, terutama kelompok marginal yang membutuhkan perlindungan lebih.

Tantangan lain yang dihadapi dalam reformasi hukum untuk perlindungan masyarakat adalah masalah kelemahan kapasitas lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Sumber daya manusia yang tidak memadai, kurangnya pelatihan dalam hal keahlian hukum yang terkait dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah-daerah terpencil menghambat terwujudnya perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Kondisi ini mempengaruhi kualitas pelayanan hukum dan memperburuk ketidaksetaraan akses keadilan.

Tantangan tersebut diperburuk dengan ketidakpastian dalam implementasi regulasi, yang seringkali hanya terfokus pada tekstual hukum dan kurang memperhatikan konteks sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, meskipun ada banyak undang-undang yang menyatakan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, implementasi di lapangan sering tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan sosial karena ada kesenjangan antara norma yang tertulis dan tindakan nyata di lapangan.

Di sisi lain, meskipun banyak tantangan, ada juga sejumlah peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mereformasi hukum Indonesia. Salah satunya adalah momentum politik yang dibawa oleh pemerintahan yang baru, yang seringkali memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan dalam kebijakan hukum. Pemerintah yang baru biasanya berkomitmen untuk membuat perubahan

dalam struktur hukum dan sistem peradilan untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi memberikan peluang untuk reformasi hukum yang lebih transparan dan inklusif. Teknologi informasi bisa digunakan untuk memperbaiki sistem peradilan melalui e-court, e-filing, dan sistem digital lainnya yang mempermudah masyarakat dalam mengakses keadilan. Teknologi ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih efisien terhadap proses-proses hukum dan mengurangi potensi terjadinya penyelewengan atau tindakan korupsi dalam sistem peradilan.¹³

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Masyarakat yang lebih terdidik dan kritis terhadap praktik hukum di sekitarnya berpotensi memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak-haknya. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menuntut perubahan dalam sistem hukum yang ada dan mengidentifikasi ketidakadilan atau kesalahan yang ada dalam penegakan hukum.

Peran lembaga-lembaga internasional dalam mengawasi penerapan hak asasi manusia di Indonesia juga menawarkan peluang untuk reformasi hukum. Negara Indonesia yang menjadi anggota organisasi internasional seperti PBB sering kali terikat pada kewajiban untuk memenuhi standar hak asasi manusia internasional. Pendampingan dan pengawasan internasional dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih bertanggung jawab dalam memastikan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.

Partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta dalam reformasi hukum juga merupakan peluang besar. Organisasi-organisasi non-pemerintah yang berfokus pada hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberantasan korupsi, dapat memainkan peran penting dalam mendorong agenda reformasi hukum. Keterlibatan mereka dapat membantu memastikan bahwa reformasi hukum benar-benar berpihak kepada masyarakat, dengan menyoroti isu-isu kritis yang perlu diselesaikan dalam sistem hukum.

¹³ Ahmad Ropei and Hakimah Nurazmina Dini, "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama" 6, no. 1 (2024): 61–82, <https://doi.org/10.15575/vh.v6i1.27462>.

Peluang lain terletak pada pengembangan sumber daya manusia yang ada di dunia hukum, seperti advokat, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih baik mengenai perlindungan hak asasi manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, reformasi hukum dapat menciptakan tenaga-tenaga profesional yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

Untuk mewujudkan reformasi hukum yang efektif, diperlukan pula kerja sama yang erat antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta sektor swasta. Melalui dialog yang konstruktif dan inklusif, berbagai pemangku kepentingan dapat menemukan solusi yang lebih tepat dan efisien dalam membangun sistem hukum yang melindungi masyarakat dengan lebih baik.

Reformasi hukum juga membuka peluang untuk memperbarui sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Misalnya, dengan mengurangi hambatan birokrasi yang dapat memperlambat proses hukum, serta memperkenalkan sistem yang memungkinkan transparansi lebih besar dalam pengambilan keputusan. Implementasi sistem peradilan yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas akan memperkuat kredibilitas sistem hukum itu sendiri.

Dalam konteks ini, peluang untuk reformasi hukum yang lebih baik adalah untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama yang paling rentan dan marginal. Pemerintah perlu mendengar suara-suara dari berbagai elemen masyarakat dan meresponsnya dengan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam reformasi hukum di Indonesia, peluang untuk melakukan perubahan masih sangat terbuka lebar. Dengan memanfaatkan semua peluang tersebut, sistem hukum Indonesia dapat terus berkembang menuju sistem yang lebih adil, efisien, dan lebih mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh masyarakat.

D. Penutup

Pembahasan tentang peran politik hukum dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dan relevansi kajian humaniora dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa perbaikan sistem hukum memerlukan integrasi antara prinsip-

prinsip moral, sosial, dan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman. Politik hukum di Indonesia memegang peranan penting dalam merumuskan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang memastikan perlindungan hak-hak masyarakat. Politik hukum yang kuat dan berbasis pada prinsip keadilan sosial akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warga negara, dan mendorong terciptanya perlindungan yang merata, terutama bagi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.

Proses reformasi hukum yang sedang berlangsung di Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan koordinasi antara lembaga negara, korupsi, serta keterbatasan sumber daya hukum di berbagai daerah. Namun, reformasi ini juga menawarkan peluang besar, seperti kesempatan politik yang terbuka dengan pemerintahan baru, kemajuan teknologi yang memungkinkan sistem peradilan yang lebih transparan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia.

Untuk mencapai perlindungan yang optimal bagi masyarakat, sangat penting untuk melibatkan berbagai elemen dalam pembentukan kebijakan hukum, mulai dari pemerintahan, masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses reformasi hukum akan mendorong sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Keberhasilan reformasi hukum akan membawa sistem hukum yang lebih efisien, adil, dan memiliki daya ungkit yang kuat dalam menciptakan keadilan sosial serta menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Secara keseluruhan, dengan sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional, tantangan yang ada dalam reformasi hukum dapat diatasi, memungkinkan Indonesia bergerak menuju sistem hukum yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warganya.

D. Referensi

- Abdul, Fatah Nasution. *Metode Penelitian. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Harfa Groups, 2019.
- Adinda, Shafiyah, and Gultom Elisatris. "Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat." *Gudang Jurnal Mutlidisiplin Ilmu* 2, no. November (2024): 466–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484>.

- Apriliandra, Sarah, and Hetty Krisnani. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.
- Citra, Irwan Simbolon, Rizky Ariesvy Sitanggang Baginda, and Rosmalinda. "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 5 (2024): 423–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2700>.
- Geofani, Milthree Saragih, Sathya Sanathana Ishwara Ade, and Kusuma Putra Rengga. "Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia Melalui Pendekatan Konstitusional." *Jurnal Reformasi Hukum* 28, no. 3 (2024): 202–17.
- Kuriain, Nafisah, and Eddy Winarni. *Metodologi Penelitian*. Saba Jaya Publisher, 2022.
- Nurliah, Nurdin, and Ummy Athahira Astika. *Ham, Gender Dan Demokrasi*. Vol. 7. Penerbit Sketsa Media, 2020.
- Purnama, Sigit, Rohinah, Sulistyaningsih, Yuyun Yulianingsih, and Iqbal Faza Ahmad. *Islam Dan Ilmu Sosial Humaniora*. Yogyakarta, 2021.
- Raditya, Andanu. "Peran Pemerintah Indonesia Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Antara Indonesia - Singapura." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 567–78. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1992>.
- Ropei, Ahmad, and Hakimah Nurazmina Dini. "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama" 6, no. 1 (2024): 61–82. <https://doi.org/10.15575/vh.v6i1.27462>.
- Sibuea, Hotma P. *Ilmu Politik Hukum*. Penerbit Airlangga, 2017.
- Wibowo, Agus. *Hukum Di Era Globalisasi Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.
- Yazdi, Mortheza Hairy, Danta Gavin, and Simamora Fredly David. "Peran Hukum Internasional Dalam Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.